

# KERAGAAN TINGKAT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (STUDI KASUS DI PULAU NIAS)

Oleh :  
Rudy S. Rivai\*)

## Abstrak

Pembangunan pedesaan di P. Nias tertinggal jauh dibandingkan dengan di daratan P. Sumatera, sehingga tingkat kesejahteraan masyarakatnya sangat rendah. Tulisan ini berusaha untuk menelaah tingkat kesejahteraan masyarakat petani di wilayah pedesaan yang kurang berkembang. Hasil pengkajian menunjukkan adanya korelasi positif antara tingkat perkembangan desa dengan tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Tingkat produktivitas hasil pertanian yang rendah, pendapatan yang rendah, dengan jumlah anggota keluarga yang besar menyebabkan pendapatan per kapita yang sangat rendah. Keadaan ini akan berlangsung terus apabila tidak ada terobosan pembangunan. Berupa perbaikan prasarana dan sarana transportasi, meningkatkan keterampilan dan pendidikan masyarakat, peningkatan bantuan sosial berupa menggalakkan program PKK dan kependudukan (KB) serta pemberian kredit dan investasi.

## PENDAHULUAN

Dalam GBHN (ketetapan MPR No. II/MPR/1983) dinyatakan bahwa pembangunan desa di Indonesia merupakan bagian integral dari pembangunan Nasional. Karena sekitar 70 persen lebih penduduk Indonesia bermukim di pedesaan, maka kebijakan pembangunan desa adalah merupakan upaya yang strategis untuk mencapai asas pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya.

Umumnya penduduk pedesaan berusaha dalam sektor pertanian dengan tingkat kesejahteraan hidup yang relatif masih rendah. Dan jumlah masyarakat miskin di Indonesia sebagian besar berada di pedesaan. Oleh karena itu upaya pembangunan desa terus digalakkan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Pemerintah terus berusaha untuk memacu pertumbuhan desa swasembada (desa maju dan modern) dengan target selama Pelita V rata-rata empat persen per tahun (Rivai, R.S. dan Simatupang, P., 1987).

Tulisan ini berusaha untuk mengidentifikasi tingkat kesejahteraan masyarakat tani di wilayah pedesaan yang kurang berkembang dan memberikan alternatif kebijakan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat tani lapisan bawah.

## KERANGKA PEMIKIRAN

Pengabaian wilayah pedesaan dalam proses pembangunan telah menimbulkan adanya perkembangan yang tidak merata antara wilayah. Perkembangan yang tidak merata ini dipertajam dengan adanya proses pencucian ("back wash effect"), dimana sumberdaya wilayah pedesaan seperti tenaga kerja, modal sumberdaya lainnya akan berpindah ke wilayah perkotaan. Keadaan ini tidak menguntungkan bagi pembangunan wilayah pedesaan, karena pada umumnya sumberdaya yang terciptakan adalah sumberdaya yang relatif bermutu tinggi.

Sejak tahun 1972/1973 Direktorat Jenderal Pembangunan Desa, Departemen Dalam Negeri menetapkan sistem tipologi dan klasifikasi tingkat perkembangan desa yang didasarkan atas tujuh indikator, yaitu : (1) perekonomian, (2) pendapatan,

---

\*) Staf Peneliti Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian, Bogor.

(3) adat istiadat dan pandangan hidup, (4) pendidikan dan keterampilan, (5) lembaga-lembaga pemercepat perkembangan desa, (6) gotong royong, dan (7) prasarana desa. Berdasarkan indikator tersebut tingkat perkembangan desa diurut menjadi (1) desa swadaya (bercorak tradisional), (2) desa swakarya (peralihan), (3) desa swasembada (maju dan modern), dan ke (4) desa Pancasila.

Kriteria/indikator tingkat perkembangan desa tersebut sangat berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat desa. Dengan kata lain ada hubungan yang erat antara tingkat perkembangan desa dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Sehingga dengan digalakkannya pembangunan desa sekaligus dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Pemikiran ini sejalan dengan pernyataan J.A.A. Van Doorn, 1979 tentang kekhawatiran diabaikannya kehadiran masyarakat tani yang merupakan jenis masyarakat yang paling umum di pedesaan dalam pembangunan desa.

Untuk dapat meningkatkan pertumbuhan desa swasembada yang sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat miskin di pedesaan, bukan hanya meningkatkan produksi saja (indikator ekonomi), tetapi juga harus dapat meningkatkan indikator lainnya, seperti pendidikan, keterampilan dan prasarana desa. Karena ketiga aspek tersebut secara tidak langsung dapat meningkatkan pendapatan.

Menurut Anwar, M.A., 1977 dan Prabowo, D., 1977, menyatakan bahwa untuk mengurangi kemiskinan di pedesaan, perlu diperhatikan empat hal dalam pembangunan desa, yaitu (1) Landreform; (2) Diskriminasi kredit; (3) Pemberian bantuan sesuai kebutuhan setempat, dan (4) Pemberian subsidi pada petani.

Pembangunan desa seyogyanya diarahkan untuk memanfaatkan secara optimal potensi sumberdaya alam dan mengembangkan sumberdaya manusianya. Dalam memanfaatkan sumberdaya alam yang perlu diperhatikan adalah infra struktur dan kelembagaan yang berkembang di ketiga tipologi desa tersebut. Hal ini penting baik untuk melihat masalah yang terjadi, potensi yang tersedia dan sekaligus mencari terobosan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat lapisan bawah.

## LOKASI PENELITIAN DAN CONTOH

Pulau Nias dipilih sebagai lokasi penelitian secara sengaja, karena wilayah ini relatif masih

tertinggal perkembangannya dibandingkan wilayah lain di daratan Pulau Sumatera. Sebagaimana telah diungkapkan oleh Napitupulu, B., 1980 bahwa P. Nias di Sumatera Utara keadaan masyarakatnya mengkhawatirkan, karena sudah banyak penduduknya terpaksa memakan ketela pohon sebagai makanan pokok, sedangkan potensi sumberdaya alamnya mempunyai peluang untuk dikembangkan.

Di P. Nias dipilih secara sengaja tiga kecamatan yang tersebar secara geografis, yaitu kecamatan Lahewa, Teluk Dalam dan kecamatan Gido. Pada tiga kecamatan tersebut dipilih secara random satu desa swadaya, satu desa swakarya dan satu desa swasembada. Pada setiap desa contoh dipilih 20 individu petani secara random, dan yang terpilih sebagian besar petani dengan mata pencaharian dominan tanaman pangan dan dominan tanaman perkebunan. Desa yang terpilih di kecamatan Lahewa adalah desa Afulu (desa swasembada); Hili-gawolo (desa swakarya) dan Onozaluku (desa swadaya). Di kecamatan Teluk Dalam adalah : desa Hilisimaitono (desa swasembada); Botohilitano (desa swakarya); dan Bawoganowo (swadaya). Di kecamatan Gido desa Hilimbawodesolo (desa swasembada), Tulumbaho (desa swakarya) dan Lolo-fitu (desa swadaya).

Pengumpulan data dilakukan oleh Tim Studi Sosial Ekonomi dan lingkungan di pulau-pulau pantai Barat Pulau Sumatera, kantor Menteri Muda Urusan Peningkatan Produksi Tanaman Keras. Penulis melaksanakan survai di P. Nias, propinsi Sumatera Utara pada bulan Januari 1988.

## KEADAAN UMUM P. NIAS

Kabupaten DT II Nias terletak di Lautan Hindia sekitar 136 km sebelah barat pantai barat Sumatera Utara. Terdiri dari 130 gugusan pulau, dan pulau Nias merupakan pulau yang terluas diantara pulau-pulau yang terletak di sebelah barat pulau Sumatera. Kabupaten DT II Nias ibukotanya Gunung Sitoli, terdiri atas 13 kecamatan yang semuanya terletak di P. Nias, kecuali kecamatan Pulau-pulau Batu terletak di Pulau Batu. Karena sebagian besar daratan kabupaten DT II Nias terletak di P. Nias, maka pada uraian selanjutnya Kabupaten DT II Nias disebut P. Nias. Mempunyai 657 desa yang menurut tingkat perkembangannya pada tahun 1985/1986 terdiri atas 135 buah desa swadaya (20,5%); 433 desa swakarya (66%) dan 89 desa swasembada (13,5%).

P. Nias termasuk pada iklim basah, jumlah curah hujan setahun rata-rata (lima tahun terakhir) 2637 mm dengan penyebaran yang hampir merata sepanjang tahun. Menurut klasifikasi Schmid dan Ferguson tergolong tipe A dengan tujuh bulan basah dan tanpa bulan kering. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan September sampai Nopember.

Pola tata guna tanah di P. Nias (data tahun 1986) didominasi oleh pertanian lahan kering 233 632 hektar (39,7%), terutama diusahakan untuk tanaman pangan bukan padi dan nilam. Luas lahan sawahnya mencapai 21491 hektar (3,8%) terdiri dari sawah pengairan yang dikelola oleh Dinas P.U. maupun sawah pengairan pedesaan, sawah tadah hujan dan sawah lebak/raha. Luas lahan perkebunan 58034 hektar (10,3%) didominasi oleh perkebunan kelapa dan karet, sedangkan jenis tanaman perkebunan lainnya adalah cengkeh, kopi, nilam, dan pala. Luas hutan menyusut terus setiap tahunnya, pada tahun 1986 hanya 137725 hektar (24,5%), sisanya adalah merupakan perkampungan, kuburan, jalan dan lain sebagainya.

Jumlah penduduk P. Nias pada tahun 1986 tercatat 550827 jiwa, dengan kepadatan rata-rata 97 jiwa per km<sup>2</sup>. Terdiri dari 96615 KK dengan rata-rata 6 orang tiap rumah tangga. Pertambahan penduduk di P. Nias termasuk tinggi, pada tahun 1977–1980 mencapai 5,37 persen dan tahun 1980–1986 menurun kembali menjadi rata-rata 2,95 persen. Termasuk struktur umur penduduk muda dengan kecepatan pertumbuhan angkatan kerja yang tinggi, pada tahun 1980–1986 rata-rata mencapai 2,5 persen per tahun.

## LINGKARAN KEMISKINAN

Pembangunan di Indonesia tidak semata-mata berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan asas pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin/masyarakat lapisan bawah adalah merupakan pengejawantahan dari asas pemerataan tersebut. Kemudian pada gilirannya mempunyai kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Dalam mempelajari masyarakat miskin, yang penting untuk diketahui adalah karakteristiknya. Tanpa mengetahui ciri-ciri dan sifat dari masyarakat golongan bawah ini, sukar menentukan kebijakan apa yang dapat mengangkat mereka dari lumpur kemiskinan.

Masyarakat miskin merupakan hasil dari kemiskinan struktural yaitu suatu keadaan dimana sebagian terbesar anggota masyarakatnya hanya menguasai/memiliki faktor-faktor produksi yang terbatas, baik dari segi jumlah maupun kualitasnya (D. Nasution, 1988).

Kuantitas dan kualitas sumberdaya yang rendah ini membuat apresiasi dan motivasi untuk maju rendah. Sehingga kurang mengadopsi teknologi yang menyebabkan produktivitas hasil sangat rendah. Dengan asset keluarga yang miskin dan produktivitas yang rendah memberikan tingkat pendapatan keluarga yang rendah.

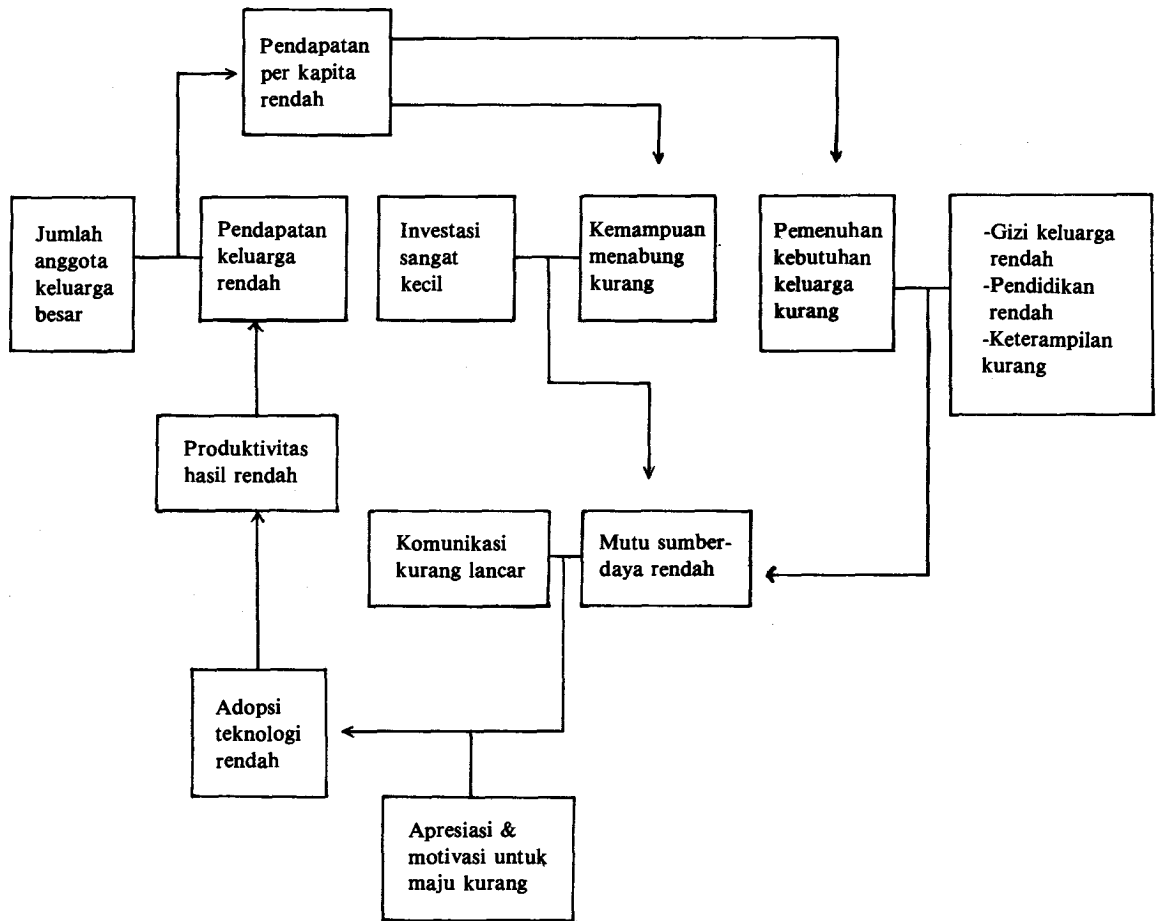
Tingkat pendapatan keluarga yang rendah dengan keadaan jumlah anggota keluarga yang besar menyebabkan pendapatan per kapita rendah (di bawah garis kemiskinan). Dalam keadaan demikian, untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari saja sudah sulit. Maka kemampuan menabung sangat rendah (tidak ada investasi). Berarti menghambat pertumbuhan, karena masalah utama dari pertumbuhan adalah pembentukan modal dan kreativitas teknologi anggota masyarakat (D.A. Adjid, 1985).

Pendapatan per kapita yang rendah tidak hanya berpengaruh terhadap kemampuan menabung/investasi, tetapi juga sangat mempengaruhi aspek kesejahteraan lainnya. Seperti tingkat pendidikan yang rendah, kekurangan gizi keluarga, kesehatan anak yang rendah dan pemenuhan kebutuhan dasar kurang (daya beli rendah). Keadaan ini berlangsung terus menerus dari generasi ke generasi berikutnya, sehingga menjadi lingkaran kemiskinan, sebagaimana dijelaskan pada Gambar 1.

## Gambaran Umum Responden

Penduduk P. Nias termasuk pada kategori "keluarga besar", hal ini dapat dilihat dari jumlah anggota keluarga yang relatif besar. Rata-rata jumlah anggota keluarga kelompok desa swadaya 8,9 orang relatif lebih tinggi dibanding kelompok desa swakarya dan swasembada yang besarnya berturut-turut 7,0 dan 6,9 (termasuk kepala keluarga).

Tingkat pendidikan responden umumnya sangat rendah. Di desa swadaya dan swasembada lebih dari setengahnya responden tidak sekolah atau tidak tamat SD, sedangkan di desa swasembada hanya 38,5 persen. Persentase yang tamat SD dan sekolah lanjutan di desa swadaya, swakarya dan swasembada berturut-turut sebesar 44,4 persen, 41,7 persen dan 61,5 persen.



Gambar 1. Lingkaran kemiskinan

Luas lahan yang dikuasai oleh responden umumnya relatif sempit/kecil. Terutama di desa swasembada sedikit sekali yang memiliki lahan sawah dibanding dua kelompok desa lainnya. Sekitar 77 persen responden menguasai luas lahan sawah kurang dari 0,5 ha, dan 58,3 persen menguasai lahan kering kurang dari satu hektar.

Rata-rata pendapatan per kapita di desa contoh relatif masih rendah, yaitu sekitar Rp 113.356,-/orang/tahun. Terutama di desa swadaya hanya mencapai Rp 74.706,-/orang/tahun, sedangkan desa swakarya dan swasembada berturut-turut sebesar Rp 116.183,-/orang/tahun dan Rp 160.484,-/orang/tahun.

### Masyarakat Miskin di Pedesaan

Untuk mengetahui tingkat kesejahteraan suatu masyarakat perlu dilihat berbagai aspek. Salah satu aspek penting yang merupakan ukuran pokok da-

lam menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat adalah aspek ekonomi. Biasanya aspek ekonomi suatu rumah tangga diukur dari tingkat pendapatannya. Dalam analisa pendapatan yang perlu diperhatikan adalah mereka yang berpendapatan rendah atau yang berada di bawah garis kemiskinan.

Permasalahan yang muncul dalam menentukan jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan di suatu wilayah adalah menentukan letak garis kemiskinannya. Berapa sebenarnya tingkat pendapatan yang cukup untuk hidup minimum yang layak, serta metode apa yang paling tepat digunakan. Berbagai penelitian telah banyak dilakukan untuk menentukan letak garis kemiskinan di Indonesia. Misalnya Anne Booth (1975); Soemitro (1977); Parera (1977); dan BPS (1984).

Dalam penelitian ini menggunakan garis kemiskinan menurut Sajogyo (1986). Patokannya adalah ekuivalen konsumsi beras per kapita per tahun

(yaitu 240 kg untuk wilayah pedesaan dan 360 kg untuk wilayah perkotaan). Walaupun ada kritik terhadap patokan tersebut Sajogyo (1977) tetap berpendapat bahwa ukuran itu dapat dipakai untuk membandingkan tingkat hidup antar zaman, antar ragam nilai rupiah dan karena pada taraf penghasilan yang rendah itu, sebagian besar pengeluaran rumah tangga untuk makan.

Dalam menentukan nilai garis kemiskinan menurut Sajogyo tersebut, jumlah 240 kg beras dikalikan dengan harga beras yang berlaku di masing-masing kelompok desa contoh. Sehingga diperoleh nilai garis kemiskinan untuk desa swasembada, swakarya dan swadaya berturut-turut Rp 105.880,-; Rp 109.200,- dan Rp 114.000,-/orang/tahun. Relatif lebih tinggi nilai garis kemiskinan di desa swadaya, karena harga beras di kelompok desa ini relatif lebih mahal dibanding kelompok desa lainnya. Mahalnya harga beras di kelompok desa swadaya, terutama disebabkan jauhnya dari pasar setempat/tingginya biaya transportasi.

Dengan nilai garis kemiskinan tersebut, dapat diketahui jumlah rumah tangga miskin (RM) dan rumah tangga tidak miskin (RTM) pada masing-masing kelompok desa contoh pada Tabel 1.

Tabel 1. Persentase rumah tangga miskin dan tidak miskin menurut klasifikasi desa di P. Nias, tahun 1987

Klasifikasi desa	Rumah tangga	
	Miskin	Tidak miskin
Swasembada	36	64
Swakarya	55	45
Swadaya	78	22
Rata-rata	56	44

Persentase rumah tangga miskin pada kelompok swadaya dua kali lebih besar dibandingkan

desa swasembada; sedangkan rata-rata keseluruhan desa contoh di P. Nias sebesar 56 persen.

Dengan demikian dapat dicatat bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat P. Nias tertinggal jauh dibanding dengan saudaranya yang lain. Kemudian berdasarkan hasil analisa Tabel 1 dapat dikatakan bahwa ada korelasi positif antara tingkat perkembangan desa dengan jumlah rumah tangga miskin. Apabila korelasi tersebut sangat kuat laju perkembangan desa akan mengurangi jumlah masyarakat miskin di pedesaan.

### Karakteristik Masyarakat Miskin

**Tingkat pendidikan.** Sebagian besar dari penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan mempunyai tingkat pendidikan yang sangat rendah. Tabel 2 menunjukkan 58,0 persen dari seluruh kepala rumah tangga kelompok rumah tangga miskin tidak tamat SD dan tidak sekolah, dibandingkan kelompok rumah tangga tidak miskin 39,3 persen. Lebih jelas pada kelompok desa swasembada menunjukkan 63,6 persen pada kelompok rumah tangga miskin dibanding 22,0 persen pada rumah tangga tidak miskin.

**Pekerjaan Utama.** Yang dimaksud dengan pekerjaan utama adalah pekerjaan yang memberikan penghasilan terbesar. Berdasarkan jenis pekerjaan utamanya, responden dikelompokkan menjadi sembilan (lihat Lampiran 1). Ternyata kelompok rumah tangga miskin relatif lebih banyak pada jenis pekerjaan buruh tani, buruh bukan tani, perkebunan dan pangan. Sedangkan pada kelompok rumah tangga tidak miskin relatif lebih banyak berdagang, perkebunan dan pangan. Terutama terjadi pada kelompok desa swakarya dan desa swadaya.

**Penguasaan lahan pertanian.** Sebagian besar pendapatan responden berasal dari sektor perta-

Tabel 2. Persentase rumah tangga miskin dan tidak miskin pendidikan kepala keluarga di P. Nias tahun 1987

Tingkat pendidikan	Swasembada		Swakarya		Swadaya		Total	
	R.M	R.T.M	R.M	R.T.M	R.M	R.T.M	R.M	R.T.M
Tidak sekolah dan tidak tamat SD	63,6	22,9	59,4	46,3	54,4	58,7	58,0	39,3
Tamat SD	31,8	51,4	25,0	28,6	36,9	23,5	32,0	37,5
Tamat SLTP	-	14,3	12,5	17,9	8,7	17,8	8,0	16,3
Tamat SLTA	4,6	11,4	3,1	7,2	-	-	2,0	7,5
Akademi/Universitas	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

nian, sehingga luas penguasaan lahan adalah merupakan modal dasar dalam mata pencaharian (usahatani) mereka. Pada Tabel 3 dapat dilihat bahwa secara keseluruhan kelompok rumah tangga miskin menguasai luas lahan yang lebih sempit dibandingkan kelompok rumah tangga tidak miskin. Terutama pada kelas lahan di bawah 0,25 hektar untuk kelompok desa swasembada, maupun untuk desa swakarya.

Untuk melihat luas penguasaan lahan seluruhnya (luas lahan sawah + luas lahan kering) dapat dilihat pada Lampiran 2. Secara keseluruhan tidak begitu berbeda nyata luas penguasaan lahan rumah tangga miskin dan tidak miskin pada semua tingkat luas lahan. Bagi rumah tangga miskin yang menguasai lahan relatif luas, kenyataannya tidak digarap seluruhnya, karena banyak yang sudah tidak produktif lagi/lahan marjinal. Sedangkan rumah tangga tidak miskin yang menguasai lahan sempit, umumnya dapat memperoleh pendapatan dari luar usahatani. Dengan demikian korelasi negatif antara tingkat pendapatan dan luas penguasaan lahan hanya nyata di lahan sawah.

**Produktivitas hasil pertanian.** Produktivitas hasil pertanian sangat mempengaruhi besarnya nilai pendapatan yang diterima petani. Selain itu juga merupakan gambaran dari tingkat adopsi teknologi yang diusahakan. Tabel 4 menyajikan tingkat produktivitas hasil padi sawah pada kelompok desa swasembada dan desa swadaya. (Pada desa swadaya sedikit sekali responden yang mengusahakan lahan sawah).

Pada kelompok rumah tangga miskin, jauh lebih rendah produktivitas hasil padi dibanding rumah tangga miskin mempunyai produktivitas hasil padi MT 1987 di bawah 12,5 kuintal per hektar. Rendahnya produktivitas ini terutama disebabkan tingkat adopsi teknologi yang rendah. Seperti pengairan yang buruk, tingkat pemupukan yang rendah dan rendahnya penguasaan kualitas pemasukan usahatani lainnya (D. Sitepu, dkk., 1988).

Secara rata-rata kelompok rumah tangga miskin produktivitas hasil padi hanya mencapai 8,53 kuintal per hektar. Dibandingkan pada kelompok rumah tangga tidak miskin rata-rata produktivitasnya dapat mencapai 15,72 kuintal per hektar pada

Tabel 3. Persentase rumah tangga miskin dan tidak miskin menurut penguasaan lahan sawah di P. Nias tahun 1987

Klasifikasi luas lahan (Ha)	Swasembada		Swakarya		Total	
	R.M	R.T.M	R.M	R.T.M	R.M	R.T.M
0,25	30,0	7,9	40,7	15,2	54,0	32,1
0,25 - 0,50	45,0	63,1	33,3	42,4	24,0	42,4
0,51 - 1,00	20,0	23,7	14,9	27,3	15,0	17,9
1,00	5,0	5,3	11,1	15,1	7,0	7,7
Jumlah	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Catatan: Kelompok desa swadaya tidak ditampilkan, karena jumlah responden yang menguasai lahan sawah tidak banyak.

Tabel 4. Persentase rumah tangga miskin dan tidak miskin menurut produktivitas hasil padi sawah di P. Nias, MT 1987

Klas produktivitas (ku/ha)	Swasembada		Swakarya		Total	
	R.M	R.T.M	R.M	R.T.M	R.M	R.T.M
7,5	31,2	11,4	74,1	31,6	38,1	19,5
7,5 - 12,5	37,5	34,3	11,1	10,5	20,9	25,9
12,5 - 20,0	25,0	34,3	7,4	15,8	14,0	27,8
20,0	6,3	20,3	7,4	42,1	7,0	27,8
Jumlah	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Catatan: Kelompok desa swadaya tidak ditampilkan, karena jumlah responden yang menguasai lahan sawah tidak banyak.

musim tanam 1987. Sedangkan secara keseluruhan produktivitas hasil padi sawah MT 1987 hanya mencapai 12,53 kuintal per hektar. Karena peningkatan produktivitas hasil padi akan meningkatkan penerimaan petani, maka perlu digalakkan pengembangan tanaman pangan di pulau Nias.

**Pola konsumsi keluarga.** Salah satu ukuran tingkat kesejahteraan keluarga masyarakat adalah pola konsumsi dan jenis bahan makanan pokoknya. Banyak penelitian atau data yang membuktikan bahwa semakin tinggi pendapatan keluarga, semakin kecil persentase pengeluaran untuk bahan makanan dan relatif semakin sejahtera.

Dari Tabel 5 dapat dilihat bahwa pada kelompok rumah tangga miskin masih cukup banyak mereka yang makanan pokoknya bukan beras. Hal ini bukan berdiversifikasi menu makanan, tetapi disebabkan ketidakmampuan memenuhi kebutuhan pokok (beras). Terutama terjadi pada kelompok desa swakarya dan desa swadaya. Sedangkan pada kelompok rumah tangga tidak miskin, jumlah itu kecil sekali.

Umumnya selera makanan pokok masyarakat di P. Nias adalah beras. Tetapi karena ketidakmampuan dari sebagian masyarakat yang miskin untuk memenuhi beras sepanjang tahun, maka

ubi-ubian, pisang atau sagu yang mereka makan dan nasi mereka makan sebagai selingan. Dari hasil wawancara terungkap bahwa masyarakat miskin terutama yang di pedalaman itu jarang sekali memakan makanan yang mengandung protein. Karena harga ikan asin, ikan segar masih dirasakan sangat mahal apalagi daging dan telur. Sehingga kekurangan gizi yang nampak dari tingkat pertumbuhan dan kesehatan anak-anaknya (Balita).

Pada konsumsi kelompok rumah tangga miskin mempunyai kecenderungan lebih besar persentase pendapatan yang dibelanjakan untuk bahan makanan dibandingkan dengan kelompok rumah tangga tidak miskin. Persentase pengeluaran untuk makanan 80 persen atau lebih pada kelompok rumah tangga miskin sebanyak 56,5 persen. Sedangkan untuk kelompok rumah tangga tidak miskin hanya sekitar 34 persen (Tabel 6).

Sebagai perbandingan, pada tingkat nasional rata-rata persentase pengeluaran untuk makanan sekitar 60 persen. Hal ini menunjukkan rendahnya tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat miskin P. Nias. Karena sebagian besar dari pendapatan keluarganya hanya dapat dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan pangan saja.

Tabel 5. Persentase rumah tangga miskin dan tidak miskin menurut bahan makanan pokok di P. Nias, MT 1987

Sumber bahan makanan pokok	Swasembada		Swakarya		Swadaya		Total	
	R.M	R.T.M	R.M	R.T.M	R.M	R.T.M	R.M	R.T.M
Beras	90,5	97,3	60,6	100,0	53,2	76,9	63,3	94,8
Ubi-ubian	9,5	0	39,4	0	40,4	7,7	33,7	1,3
S a g u	0	0	0	0	6,4	15,4	3,0	2,6
Ubi-ubian dan pisang	0	2,7	0	0	0	0	0	1,3
Jumlah	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Tabel 6. Persentase rumah tangga miskin dan tidak miskin menurut bahan makanan pokok di P. Nias, MT 1987

Persentase pengeluaran untuk makanan	Swasembada		Swakarya		Swadaya		Total	
	R.M	R.T.M	R.M	R.T.M	R.M	R.T.M	R.M	R.T.M
80	75,0	17,1	54,4	28,6	56,8	33,3	56,5	24,0
70-79	5,0	11,5	22,2	14,3	21,3	25,0	20,2	14,7
50-69	10,0	42,8	9,3	32,2	25,5	41,7	17,2	38,6
50	10,0	28,6	3,1	25,0	6,4	-	6,1	22,7
Jumlah	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

## KESIMPULAN DAN SARAN

1. Pembangunan pedesaan di P. Nias tertinggi jauh dibanding dengan di daratan P. Sumatera. Kurangnya sarana dan prasarana perhubungan baik di dalam maupun ke luar P. Nias merupakan salah satu hambatan utama dalam pembangunan di P. Nias. Sehingga sebagian besar masyarakat di kelompok desa swadaya dan swakarya masih berada di bawah garis kemiskinan.
2. Terdapat korelasi positif antara tingkat perkembangan desa (yang didasarkan atas tujuh indikator perkembangan desa) dengan tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Dengan demikian pembangunan desa di P. Nias akan dapat mengurangi jumlah masyarakat miskin di pedesaan.
3. Tingkat produktivitas hasil yang rendah (pada lahan sawah) menyebabkan rendahnya pendapatan keluarga tani. Dengan rata-rata jumlah anggota keluarga yang besar mengakibatkan pendapatan per kapita sangat rendah. Sehingga investasi hampir tidak ada dan pemenuhan kebutuhan keluarga (sandang, papan, dan pangan) sangat kurang. Merupakan lingkaran kemiskinan dari generasi ke generasi berikutnya.
4. Untuk mempercepat pembangunan di P. Nias perlu dilakukan terobosan yang dapat memutuskan rantai lingkaran kemiskinan. Perbaikan prasarana dan sarana transportasi mutlak diperlukan agar kegiatan pembangunan dapat berjalan lancar.
5. Peranan pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam hal meningkatkan keterampilan, menyebarluaskan PKK dan program kependudukan (KB) serta bantuan sosial lainnya sangat diperlukan. Pemberian kredit dan investasi baik oleh pemerintah maupun swasta diperlukan, setelah ada perbaikan infrastruktur termasuk peningkatan adopsi teknologi melalui program penyuluhan yang terpadu.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adjid, D.A., 1985. Pola Partisipasi Masyarakat Pedesaan Dalam Pembangunan Pertanian Berencana. Disertai. Universitas Padjadjaran, Bandung.
- Anwar, M.A., 1977. Lebih Mungkin Mengurangi Jumlah Orang Miskin Daripada Meratakan Pendapatan. Prisma No.3 Tahun ke-VI. LP3ES. Jakarta.
- Napitupulu, B., 1980. Paradoks Pembangunan, PT. Kaji Pembangunan.
- Nasution, D. 1988. Struktur Mekanisme Kemiskinan di Indonesia. Transportasi Seri III. Yayasan AP Bersama Forum Ilmu Sosial Transformatif. Jakarta.
- Prabowo, D. 1977. Diskriminasi Kebijakan Untuk Memerangi Kemiskinan di Desa. Prisma No.3 Tahun ke-IV. LP3ES. Jakarta.
- Rivai, R.S. dan P. Simatupang, 1987. Profil Perekonomian dan Peranan Pemuda Dalam Pembangunan Desa. Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (PERHEPI).
- Sajogyo, 1977. Golongan Miskin dan Partisipasinya Dalam Pembangunan Desa. Prisma No.3 Tahun ke-IV. LP3ES. Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1986. Laporan Penelitian Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Pedesaan. Prisma No.3 Tahun ke-IV.



Lampiran 1. Persentase rumah tangga miskin dan tidak miskin menurut pekerjaan utama di P. Nias, tahun 1987

Pekerjaan utama	Swasembada		Swakarya		Swadaya		Total	
	R.M	R.T.M	R.M	R.T.M	R.M	R.T.M	R.M	R.T.M
Buruh tani	—	5,4	18,7	7,1	21,3	7,6	1,0	6,4
Buruh bukan tani	9,5	10,8	15,6	14,3	12,8	—	13,0	10,3
Pangan	28,6	29,7	31,3	25,0	2,1	—	16,0	23,7
Perkebunan	28,6	13,5	15,6	17,8	34,0	38,5	27,0	19,2
Peternakan	4,8	5,4	9,4	—	10,6	—	9,0	2,6
Perikanan	9,5	2,7	6,3	7,2	4,2	—	6,0	3,8
Dagang	9,5	13,5	—	7,1	6,5	23,1	5,0	12,8
Pegawai Negeri	4,8	8,1	3,1	10,7	—	7,7	2,0	9,0
Lainnya	4,7	10,9	—	10,8	8,5	23,1	5,0	12,8
Jumlah	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Lampiran 2. Persentase rumah tangga miskin dan tidak miskin menurut penguasaan lahan di P. Nias, tahun 1987

Klasifikasi luas lahan	Swasembada		Swakarya		Swadaya		Total	
	R.M	R.T.M	R.M	R.T.M	R.M	R.T.M	R.M	R.T.M
0,50	30,0	23,7	23,4	7,7	18,2	29,7	24,0	23,1
0,50 – 1,00	35,0	18,4	14,9	23,1	24,2	22,2	26,0	20,5
1,01 – 2,00	15,0	26,3	21,3	30,8	24,2	14,2	20,2	23,1
2,01 – 4,00	15,0	24,9	29,8	23,1	30,4	22,2	27,0	25,6
4,00	5,0	6,7	10,6	15,3	3,0	11,7	3,0	7,7
Jumlah	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0